

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA LOWU-LOWU KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH

Pangeran¹, Bakri Yusuf¹, Amin Tunda¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

E-mail: pangeransangaji14@gmail.com, bakriyusuf0811@gmail.com, amin.tunda@uho.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts of the village government in improving the welfare of the fishing community during the Covid-19 pandemic in Lowu-Lowu Village, Gu District, Central Buton Regency to find out the obstacles/barriers to the village government in improving welfare. fishing communities during the COVID-19 pandemic and to find out which villages are distributing poverty reduction program assistance in order to improve the welfare of fishing communities during the Covid-19 pandemic, Lowu-lowu Village, Gu District, Central Buton Regency. The research method used in this study used descriptive qualitative research. The informants in this study were the village head, Lowu-Lowu, the village secretary and the community. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Village Government is a leader entrusted by the central government as a driver in improving the welfare of its people. With the Covid-19 outbreak, the village government has provided assistance to the community in the form of Direct Cash Assistance (BLT). The village government has provided assistance to the community, especially to the Bantug fishing community provided by the village government, namely fiber boats and fiber engines. During the Covid-19 pandemic in Lowu-Lowu village, we worked together to clean the environment, such as the home environment, the mosque environment. This activity is carried out every day so that cleanliness is always maintained to prevent the spread of Covid-19. The obstacles/obstacles experienced by the village government in encouraging community participation in village development are that the existing village fund budget is still lacking so that development has not been carried out and all the wishes of the community have not been fulfilled. And for community human resources that are still lacking, there are pros and cons in the community because there are still some people who do not understand.

Keywords: Efforts, Improving the Welfare of Fishing Community, Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju,

mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti dan bersifat multidimensional. Disebut cair karena kemiskinan bisa bermakna subjektif, tetapi sekaligus juga bermakna objektif. Secara objektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin karena pendapatannya sudah berada di atas batas garis kemiskinan, yang oleh sementara ahli ukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi.



Akan tetapi, apa yang tampak secara objektif tidak miskin itu bisa saja dirasakan sebagai kemiskinan oleh pelakunya, karena adanya perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhannya atau bahkan dengan membandingkan kondisi yang dialami oleh orang lain, yang pendapatannya lebih tinggi darinya (Imron, 2003).

Dengan melihat potensi sumber daya maritim Indonesia yang besar tentunya menjanjikan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan. Ekosistem daerah pesisir diwarnai memiliki potensi sumber daya yang berpeluang dalam bidang ekonomi yang produktif. Wilayah pesisir dimanfaatkan dengan optimal supaya mampu menyumbangkan sumbangsih untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Fenomena dalam meningkatkan kesejahteraan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Sumber daya alam nelayan dilihat dari realitasnya saat ini berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat yang masih belum optimal. Sumber daya nelayan ini belum bermanfaat dengan optimal dalam menunjang perekonomian secara terpadu. Sumber daya nelayan tersebut baik sektor perikanan, terumbu karang, dan rumput laut. Perkembangan ekonomi yang masih terbelakang memicu banyaknya masalah kehidupan sosial mulai kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kesejahteraan diantara masyarakat desa setempat.

Pendidikan masyarakat nelayan masih minim sehingga tidak memiliki kemampuan dan keterampilan berbasis teknologi perikanan sesuai dengan kemajuan IPTEK saat ini, sehingga masyarakat nelayan tergolong sebagai masyarakat miskin dengan indikasi tingkat

pendapatan perekonomiannya yang rendah dimasa pandemi covid-19. Pola kemiskinan dirasakan masyarakat nelayan di Desa Lowu-Lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah.

Seperti masyarakat di desa Lowu-Lowu yang diduduki oleh masyarakat nelayan. Seperti aktivitas manusia biasanya masyarakat bekerja pada pagi hari atau sore hari. Hal yang memprihatinkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat nelayan dalam hal pembangunan di sekitar masyarakat yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di desa Lowu-Lowu. Membangun sumber daya laut yang belum menjadi perhatian untuk pemulihan ekonomi masyarakat nelayan dengan melihat potensi alam dan dapat dimanfaatkan masyarakat dapat menunjang dan menambah pendapatan masyarakat dan menambah taraf hidup. Sehubungan hal ini tentu pemerintah desa sangat berperan aktif dalam segala bentuk aspek yang menunjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan maupun itu eksternal ataupun internal.

Pesisir identik dengan nelayan, tetapi tidak hanya sumber daya nelayan yang bisa di manfaatkan masyarakat sekitar. Sumber daya nelayan yang lain bisa di manfaatkan seperti pariwisata dengan kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah setempat masyarakat hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut seperti menangkap ikan lalu di jual dan penghasilan yang tidak seberapa. Tentunya dengan hal di atas pemerintah desa bisa menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi dengan masyarakat nelayan, upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat nelayan sangat dibutuhkan karena sampai saat ini peran pemerintah masih sedikit kurang. Pendapatan atau penghasilan yang



diterima masyarakat nelayan dari hasil laut hanya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari keluarga saja, untuk itu perlu adanya perhatian dan peningkatan dan dukungan pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Sebelum adanya wabah covid-19 ini, masyarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan di desa lowu-lowu memiliki pendapatan yang cukup banyak dari hasil penjualan ikan yang di tangkap. Tetapi, dengan adanya wabah covid-19 ini masuk ke Indonesia semua masyarakat nelayan khususnya di desa lowu-lowu tidak bisa menjual hasil tangkapan ikannya di karenakan adanya larangan berkumpul di keramaian seperti di pasar, sehingga perekonomian masyarakat nelayan menurun.

Kondisi masyarakat nelayan di desa lowu-lowu saat ini dikategorikan kurang sejahtera dikarenakan adanya wabah covid-19 sehingga perekonomian masyarakat nelayan untuk pendapatannya sudah semakin berkurang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dengan permasalahan tersebut masyarakat nelayan membutuhkan uluran tangan dan perhatian dari pemerintah desa lowu-lowu dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pemerintah desa tentunya berpartisipasi aktif secara langsung untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan yang sedang bemasalah. Seperti bantuan yang dapat diberikan pemerintah desa lowu-lowu untuk masyarakat nelayan di masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lowu-Lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian ini, dengan alasan bahwa di Desa Lowu-Lowu juga mengalami masa pandemi covid-19 yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan,

sehingga pemerintah desa melakukan beberapa upaya sebagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Keluarga Nelayan di Desa Lowu-Lowu.

Teknik pengumpulan data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu studi yang dilakukan untuk menganalisis topik permasalahan yang ingin diteliti baik berupa data yang diambil dari dokumen-dokumen, arsip, jurnal, artikel, hasil penelitian atau buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dan Penelitian lapangan, yaitu : pengamatan (observasi) wawancara terbuka dan mendalam, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam Upe (2016), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Yaitu reduksi data (data reduction), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Penarikan kesimpulan/verifikasi).



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mantobua Kecamatan Lohia Kabupaten Muna

a. Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Setiawan (2013) peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dansuatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada

Kondisi lingkungan di desa Mantobua selama pandemi ini dinyatakan zona hijau, namun seperti kondisi pandemi lainnya di Desa Mantobua juga diarahkan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sebelum masa pandemi anggaran dana desa digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan selokan, pembangunan gedung untuk balai desa, dan pembangunan pasar.

Dimasa pandemi ini pemerintah pusat telah membuat surat edaran terkait pengalihan anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap pertama anggaran dana desa di berikan untuk masyarakat sebesar 30%, namun seiring berjalan ternyata Covid-19 terus bertambah maka sampai akhir desember kemarin anggaran dana desa semuanya dialihkan untuk bantuan ke masyarakat. Pada tahap pertama selama tiga bulan masyarakat diberikan bantuan sebesar Rp, 600.000,00 perbulan

sampai bulan juni dan tahap kedua sampai bulan desember masyarakat diberi bantuan sebesar Rp, 300.000,00 perbulannya.

b. Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Setiawan (2013) yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Sebelum pandemi masyarakat Desa Mantobua telah diberi bantuan berupa penampung air karena kondisi Desa Mantobua yang jauh dari sumber air namun itu hanya untuk beberapa kepala keluarga saja, namun pada masa pandemi ini sebagian besar masyarakat telah mendapat program bantuan ini. Selain itu, kepala desa juga memfasilitasi masyarakat yang ahli dalam bidang mesin dengan memberikan fasilitas dalam membuka usaha bengkel seperti pemberian bantuan kompresor dengan tujuan bagi siapa saja yang memiliki keahlian dalam bidang ini bisa bekerja di bengkel tersebut.

c. Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Setiawan (2013) peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang



berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Dimasa Covid-19 ini kepala desa selalu mengarahkan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan. Beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan kepala desa selama Covid-19 ini adalah diantaranya gotong royong dalam membersihkan pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. pemisahan tempat penjual juga dilakukan untuk menghindari agar tempat berjualan tidak kumuh seperti penjual ikan akan ditempatkan satu petak, penjual sayur akan ditempatkan satu petak juga. Tujuan dari pemisahan tempat ini agar masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan pasar.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi Covid-19

a. Faktor Pendukung

- Sumber daya aparatur desa

Dalam Melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Sumber Daya Manusia sebagai pelaku untuk melaksanakan

koordinasi kegiatan pembangunan. Didalam ruang lingkup Desa yang termasuk Sumber Daya Manusia yang memiliki peran sangat penting untuk melaksanakan pembangunan desa yaitu aparatur pemerintah desa (Mahayana, 2013)

Selama Covid-19 aparatur Desa Mantobua selalu bekerja sama yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari agar masyarakat tidak berkerumun maka aparatur desa membagikan BLT kerumah-rumah masyarakat. Setiap RT diberikan tugas kepada beberapa aparatur desa untuk mempercepat penyaluran program ini.

- Partisipasi masyarakat

Bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan dapat berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berlangsung serta kegiatan desa lainnya. Pada tingkat desa ada beberapa tahapan dalam penyusunan rencana program pembangunan. Penyusunan program diawali pada tingkat RT untuk menggali gagasan dan usulan program pada forum musyawarah RT (Mahayana, 2013).

Masyarakat selalu berpartisipasi dalam mencegah penyebaran covid 19 dengan mengikuti protokol kesehatan selama pandemi seperti memakai masker, menjaga jarak bila berada ditempat keramaian. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pandemi ini yaitu jika berada dari luar daerah maka harus melakukan isolasi mandiri untuk menghindari resiko yang bisa



terjadi seperti penyebaran virus Covid-19.

b. Faktor Penghambat

- Sumber dana

Untuk anggaran keuangan yang diperoleh desa masih terbatas untuk melakukan kegiatan pembangunan, hanya untuk kegiatan operasional desa kemampuan anggaran digunakan. Bagaimana dengan pendapatan asli desa (PADes) yang bisa digunakan oleh desa. Hanya saja untuk daerah pedesaan belum mampu menciptakan dan memanfaatkan potensi sebagai pendapatan asli desa (Mahayana, 2013).

Di Desa Mantobua pada awalnya tidak banyak melakukan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan pada kemampuan keuangan desa yang dimiliki. sumber dana untuk desa Mantobua itu hanya memanfaatkan dana yang berasal dari pemerintah saja sedangkan dana dari desa mantobua sendiri itu belum ada. Untuk tahun ini anggaran dana desa akan dialihkan untuk masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dari pemerintah pusat jga menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung maka anggaran dana desa ini hanya akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

- Sumber daya manusia dan teknologi

Selain itu faktor penghambat kepala desa dalam pembangunan masyarakat adalah rendahnya kualitas sumber daya

manusia dan teknologi yang dimiliki aparatur desa ditingkat RT dan kesibukkan dari masing-masing warga. Padahal, kunci sukses pembangunan disuatu wilayah tergantung dari partisipasi pemerintah, dan masyarakat (Suwanti, 2016).

Masyarakat Desa Mantobua masih banyak yang belum paham kegunaan dari teknologi itu untuk apa. Banyak dari masyarakat yang tanpa membaca langsung membagikan berita tersebut. Hal ini dikhawatirkan oleh kepala desa karena jika mereka membagi informasi yang belum tentu kebenarannya maka bukan hanya berdampak kepada individu masyarakat sendiri namun kepada kelompok masyarakat lainnya juga. Seperti halnya sekarang ini seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan lebih baik lagi informasi itu karena banyak informasi tentang penyebaran Covid-19 yang bersifat hoax. Masyarakat juga harus pintar dalam membagi informasi yang akurat dan lebih memperhatikan penulis dalam berita yang akan disebarkan.

KESIMPULAN

Beberapa peran yang kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).
2. Di desa Mantobua kepala desa telah memfasilitasi berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan desa seperti



- memberikan fasilitas dalam membuka usaha bengkel.
3. Selama pandemi di desa Mantobua terus melakukan gotong royong seperti pembersihan lingkungan misalnya pembersihan dilingkungan pasar, dan tempat ibadah yang dilakukan oleh aparatur desa dan melibatkan dengan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung
 - a. Aparatur desa dengan kepala desa jika melakukan suatu kegiatan itu saling melibatkan seperti halnya dimasa pandemi ini banyak kegiatan yang dilakukan misalnya penyemprotan disinfektan yang dilakukan masing-masing RT/RW dan dibantu aparatur desa lainnya.
 - b. Partisipasi masyarakat desa Mantobua selama pandemi ini, adalah masyarakat melakukan apa yang menjadi arahan pemerintah desa seperti larangan untuk melakukan banyak kegiatan diluar dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari penyebaran Covid-19.
2. Faktor Penghambat
 - a. Sumber dana di Desa Mantobua itu hanya terpaku pada anggaran dana yang disalurkan pemerintah dan untuk tahun 2020 ini anggaran dana desa ini disalurkan untuk masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

- b. Sumber daya manusia di desa Mantobua itu masih rendah karena dalam menggunakan teknologi masih sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahayana, Wayan. 2013. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. Volume 1 Nomor 1. Halaman 400-414. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Setiawan, Anggi. 2013. Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan DiDesa Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. Volume 1 Nomor 3. Halaman 1095-1109. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Suwanti. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Volume 4 Nomor 1. Halaman 2234-2248. Jurnal Adminitrasi Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Upe, Ambo. 2016. Metode Penelitian Sosial (Filosofi dan Desain Praktis). Kendari . Literacy Institute.

